



Penyelidikan Kritis Terhadap Perlakuan Pra-Peradilan Kepada Tersangka Penyandang Disabilitas Intelektual Di Irlandia

English Title: A Critical Inquiry into the Pre-Trial Treatment of Intellectual Disability Suspects in Ireland

Asheka Malikus Zachwa ^a

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence: asekamalik120@gmail.com

Abstract

This article aims to critically evaluate contemporary Irish police practice, with an emphasis on emerging procedural innovations, given the needs of suspects with intellectual disabilities. A review of published prevalence data in relation to people with intellectual disabilities in the Irish criminal justice system, the Irish legal and policy landscape, and the results of recent empirical investigations are utilized in the critical evaluation. In line with extant international research, this article identifies three areas of concern in relation to existing protocols within An Garda S to identify and respond to intellectual disability, including: (1) communication barriers; (2) the need to build awareness and skills of police and persons with intellectual disabilities; and (3) the need for institutional change to ensure equal access to justice for persons with intellectual disabilities. Progress is being made at a systems level towards a human rights approach within Irish policing. In representing the first international analysis of its kind, this article situates the barriers facing suspects with intellectual disabilities in Ireland within a discourse sensitive to procedural reform led by ongoing research within An Garda S (Ireland's national police service). Due to the universal nature of these barriers across policing systems internationally, this format of reform will be relevant to many other police states, particularly those 162 signatories to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Keywords: Criminal justice system, Policing, Criminology, Police training, Due process, Vulnerable suspects

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis praktik polisi Irlandia kontemporer, dengan penekanan pada inovasi prosedural yang muncul, mengingat kebutuhan tersangka penyandang disabilitas intelektual. Tinjauan data prevalensi yang diterbitkan sehubungan dengan penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana Irlandia, lanskap hukum dan kebijakan Irlandia, dan hasil penyelidikan empiris baru-baru ini digunakan dalam evaluasi kritis. Sejalan dengan penelitian internasional yang masih ada, artikel ini mengidentifikasi tiga tempat yang menjadi perhatian sehubungan dengan protokol yang ada di dalam An Garda S untuk mengidentifikasi dan menanggapi kecacatan intelektual, termasuk: (1) hambatan komunikasi; (2) perlunya membangun kesadaran dan keterampilan polisi dan penyandang disabilitas intelektual; dan (3) perlunya perubahan kelembagaan untuk menjamin akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas intelektual. Kemajuan sedang dibuat pada tingkat sistem menuju pendekatan hak asasi manusia dalam kepolisian Irlandia. Dalam mewakili analisis internasional pertama dari jenisnya, artikel ini menempatkan hambatan yang dihadapi tersangka penyandang disabilitas intelektual di Irlandia dalam sebuah wacana yang peka terhadap reformasi prosedural yang dipimpin oleh penelitian yang sedang berlangsung dalam An Garda S (dinas kepolisian nasional Irlandia). Karena sifat universal dari hambatan-hambatan ini di seluruh sistem kepolisian secara internasional, format reformasi ini akan menjadi relevan bagi banyak negara kepolisian lainnya, khususnya 162 penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: Sistem peradilan pidana, Pemolisian, Kriminologi, Pelatihan polisi, Proses hukum, Tersangka rentan

1. Latar Belakang

Dalam menandai penyimpangan dari federalisasi, model kepolisian lokal yang ada di banyak yurisdiksi hukum umum, penegakan hukum di Irlandia datang dalam lingkup otoritas nasional tunggal yang bersatu, An Garda S (artinya, "Penjaga Perdamaian"). Sebagai satu-satunya badan kepolisian dalam yurisdiksi –yang bertanggung

jawab secara eksklusif kepada Menteri Kehakiman – anggota An Garda S menikmati pengaruh yang tak tertandingi atas lintasan investigasi kriminal (Cusack, 2018). Selain itu, sebagai penanggap pertama terhadap dugaan tindakan kriminalitas, mereka ditempatkan secara unik untuk mengidentifikasi dan menerapkan perlindungan prosedural pra-sidang yang penting, yang telah dirancang khusus untuk melindungi dan membela hak-hak pribadi tersangka kejahatan (Cusack, 2021a).

Untuk alasan ini, kapasitas pejabat polisi Irlandia untuk menanggapi dengan tepat kekhawatiran tersangka kejahatan pada tahap awal, sering kali traumatis, tahap pra-persidangan dari proses pidana telah lama diakui sebagai faktor utama dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai, keadilan, dan legitimasi layanan kepolisian berbasis komunitas Irlandia. Memang komitmen lama Irlandia terhadap model pemolisian dengan persetujuan (Thompson dan Payne, 2019) dilambangkan dalam kata-kata terkenal dari Michael Staines, Komisaris pertama Irlandia dari An Garda Sioch ana: “Kami akan berhasil bukan dengan paksaan tetapi pada otoritas moral kita sebagai pelayan rakyat”.

Untuk tersangka penyandang disabilitas intelektual, sangat penting untuk menerapkan respons polisi yang disesuaikan dan disesuaikan. Studi menunjukkan bahwa setiap kegagalan untuk mengadaptasi formalitas forensik (khususnya, wawancara investigasi) dan protokol komunikasi (khususnya, pemberitahuan hak) diikuti oleh polisi pada tahap pra-sidang dari proses pidana untuk memperhitungkan kebutuhan unik dari individu-individu ini dapat secara material membiaskan keakuratan kesaksian yang diperoleh (Gulati et al., 2020).

Di luar mengangkat keprihatinan instrumental yang jelas berkaitan dengan integritas proaktif dari praktik polisi, kemampuan prosedural atau budaya dalam dinas kepolisian tidak dapat dengan mudah diselaraskan dengan standar hak asasi manusia internasional yang diamanatkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 13) dan Konvensi Eropatentang Hak Asasi Manusia (Pasal 6) (Gulati et al., 2020a). Selain itu, pendekatan semacam itu juga tidak dapat diselaraskan dengan kewajiban konstitusional Negara Irlandia untuk mengamankan “pengadilan pada waktunya” bagi semua orang yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 38 (Konstitusi Irlandia).

Namun, terlepas dari titik penghormatan yang ditempati kantor polisi di Irlandia sebagai tempat pertemuan untuk serangkaian bukti mendasar, hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusional, sedikit yang diketahui pada saat penulisan tentang tantangan unik, yang dihadapi oleh tersangka penyandang disabilitas intelektual. selama interaksi awal mereka dengan petugas penegak hukum Irlandia (Gulati et al., 2021a). Dalam upaya untuk mengatasi kekosongan penelitian ini, artikel ini menyurvei prosedur polisi Irlandia – dan lingkungan budaya yang lebih luas di mana ia dipraktikkan – dengan maksud untuk mengevaluasi secara kritis kesesuaian lanskap pra-persidangan Irlandia sehubungan dengan kebutuhan orang-orang dengan kecerdasan intelektual. disabilitas. Berdasarkan temuan penyelidikan kualitatif pertama Irlandia terhadap hambatan yang dirasakan yang dihadapi tersangka penyandang disabilitas intelektual dalam proses pra-sidang Irlandia (Gulati et al., 2021a), sejumlah lokasi yang menjadi perhatian diidentifikasi sehubungan dengan protokol yang ada di dalam Sebuah Garda S untuk mengenali dan menanggapi kecacatan intelektual.

Kekhawatiran ini, yang diungkapkan oleh agen yang diambil dari badan perwakilan, profesional perawatan kesehatan, dan profesional dalam sistem peradilan pidana Irlandia, antara lain terkait dengan kapasitas pejabat polisi Irlandia untuk memenuhi kebutuhan komunikatif penyandang disabilitas intelektual, adopsi yang konsisten dari teknik forensik, akses ke informasi yang dapat dipahami dan ketersediaan perlindungan prosedural yang ditingkatkan selama proses investigasi. Melalui penerapan analisis tematik terapan (ATA), artikel ini mengategorikan dan membongkar situs-situs yang menjadi perhatian ini (banyak di antaranya menjadi perhatian universal bagi layanan kepolisian internasional) melalui pembukaan tiga tema yang melingkupi, yaitu, (1) “Hambatan untuk Komunikasi”; (2) “Membangun Kesadaran dan Keterampilan” dan (3) “Perubahan Kelembagaan dan Sistem” (Gulati et al., 2021a).

Yang penting, dan dalam mewakili analisis internasional pertama dari jenisnya, artikel ini menempatkan masing-masing tantangan ini dalam sebuah wacana yang peka terhadap inovasi prosedural yang muncul dalam An Garda S. Dengan memanfaatkan serangkaian latihan pemolisian inklusi yang sedang berlangsung yang baru-baru ini dilakukan di Irlandia, artikel ini dimaksudkan untuk bertindak sebagai titik referensi yang memberanikan bagi lembaga penegak hukum internasional lainnya, mendorong mereka untuk menilai kembali strategi pemolisian mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran tersangka dengan cacat intelektual.

2. Tinjauan Pustaka

Sebelum penyelidikan kualitatif baru-baru ini (Gulati et al., 2021a), sangatsedikit yang diketahui tentang jenis hambatan yang dianggap oleh pejabat polisi Irlandia dan pemangku kepentingan peradilan pidana Irlandia lainnya (termasuk pengacara, peradilan, dan profesional kesehatan) untuk menghadapi penyandang disabilitas intelektual di interaksi mereka dengan An Garda S. Demikian pula, hanya sedikit yang diketahui dan tetap diketahui hingga hari ini tentang bagaimanapenyandang disabilitas intelektual secara subyektif mengalami interaksi mereka sendiri dengan An Garda S (Gulati et al., 2020b). Mengingat kurangnya penelitianberorientasi Irlandia di bidang ini (Cusack, 2021; Gulati et al., 2021a), studi internasional memberikan nilai heuristik yang sangat besar untuk meningkatkan wawasan terkait sejauh mana prosedur kepolisian arus utama secara global “mengambil penjelasan yang memadai tentang hambatan struktural dan institusional bagi penyandang disabilitas” (Diesfeld et al., 2008, hlm. 433). Oleh karena itu, studi-studi ini, seperti yang akan terlihat di bawah, memberikan dasar kontekstual yang penting untuk setiap penilaian kontur lanskap pra-peradilan Irlandia dan menimbulkan pertanyaan mendesak yang canggung tentang inklusivitas prosedur polisi Irlandia dan budaya yang mengelilinginya.

Mengadaptasi prosedur kepolisian: konteks internasional

Di awal pemaparan dimensi ontologis gangguan intelektual, penting untuk ditekankan bahwa tidak ada alasan untuk secara otomatis mendiskreditkan saksitersangka kejahatan karena memiliki disabilitas intelektual (Cusack, 2020a). Baik kerentanan psikologis orang-orang tersebut maupun keterbatasan terkait dalam fungsi sosial, menghadirkan tantangan pembuktian yang tidak dapat diatasi dalam proses pidana (Cusack, 2020c). Seperti yang ditunjukkan oleh Gudjonsson (2003, p. 334), tidak ada dasar empiris untuk memperlakukan buktiindividu sebagai tidak dapat diandalkan hanya karena dia hadir dengan ketidakmampuan intelektual: “Orang dengan ketidakmampuan belajar sedang mungkin dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan. bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta dasar, bahkan ketika mereka pada umumnya sangat mudah disugesti dan rentan terhadap konfabulasi”.

Namun, seperti yang dicatat oleh Cusack (2022), “agar bukti terbaik menang, desain proses forensik dan, khususnya, ketersediaan dukungan kesaksian yang ditargetkan adalah kuncinya”. Jenis pertanyaan yang diajukan, status orang yang mengajukannya dan formalitas arena di mana interogasi ini berlangsung semuanya ditemukan memainkan peran mendasar dalam membentuk akurasi faktual dari kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksidengan disabilitas intelektual di pengadilan.

Sekarang sudah diakui secara luas, misalnya, bahwa penyandang disabilitasintelektual memberikan jawaban yang paling akurat untuk pertanyaan terbuka dan bebas mengingat (misalnya “Jelaskan dia?”). Namun, sementara orang-orang tersebut sering menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini dengan tingkat akurasi yang mirip dengan populasi umum, penelitian menunjukkan bahwa tanggapan ini seringkali kurang lengkap dalam hal detail faktual mereka. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih terarah dan tertutup (misalnya, “Apakah kemeja yang dikenakannya berwarna biru?”) ditemukan menghasilkan responsyang lebih rinci, yang kurang tepat secara faktual.

Studi juga menemukan bahwa individu dengan disabilitas intelektual secarakomparatif lebih mudah dibujuk, lebih setuju, lebih cenderung untuk bercakap-cakap dan lebih cenderung terlibat dalam penyangkalan daripada rekan merekadalama populasi umum (Cusack, 2020a). Selain itu, ada bukti yang menunjukkanbahwa saksi tersebut berisiko tinggi mengaburkan rincian umum tentang dugaan insiden seperti nama, waktu dan tanggal, bahwa mereka akan memilikibias pilihan akhir dalam menanggapi pertanyaan pilihan ganda tertutup, bahwamereka pengetahuan tentang proses hukum seringkali sangat minim dan merekaberjuang untuk memahami terminologi hukum (Beail, 2002).

Jelas dari studi internasional ini bahwa setiap kegagalan untuk mengadaptasi prosedur forensik pada tahap prasidang dari proses pidana untukmemperhitungkan “realitas ontologis dari gangguan intelektual” (Cusack, 2017, hlm. 448) tidak hanya menimbulkan kerugian material. risiko memunculkan kesaksian yang tidak akurat, tetapi juga bahaya yang lebih luas dan lebih mendesak untuk mendapatkan keyakinan yang salah melalui pengakuan bukti yang salah dan memberatkan diri sendiri (Gudjonsson, 2010).

Namun, terlepas dari bahaya paten ini, tinjauan naratif baru-baru ini yang mengeksplorasi pengalaman petugas penegak hukum secara internasional mengungkapkan berbagai masalah kepolisian operasional yang ada sehubungan dengan mengidentifikasi, dan berkomunikasi secara tepat dengan, orang-orang dengan disabilitas intelektual; tidak adanya perlindungan prosedural bagi tersangka yang rentan dan adanya kebutuhan luas yang tidak terpenuhi akan pelatihan khusus (Gulati et al., 2020c). Dihadapkan dengan prospek menghadapi praktik polisi arus utama yang mampu seperti itu, penyandang disabilitas intelektual telah melaporkan perasaan "takut dan bingung" dalam interaksi mereka dengan lembaga penegak hukum dan, mungkin tidak mengherankan, mereka telah mengidentifikasi tantangan signifikan dalam memahami informasi, mengakses informasi praktis dan emosional. mendukung berkomunikasi dengan petugas dalam pengaturan tahanan polisi (Gulati et al., 2020b).

Mengadaptasi prosedur kepolisian: konteks Irlandia

Di Irlandia, tingkat prevalensi kecacatan intelektual dalam ruang tahanan polisi Irlandia saat ini tidak diketahui (Cusack, 2021). Akibatnya, sulit untuk menemukan susunan demografis populasi tahanan Irlandia dalam perkiraan internasional yang menunjukkan keterwakilan yang berlebihan dari konstitusi ini dalam pengaturan tahanan polisi (Gulati et al., 2020a). Meskipun fokus, penelitian berorientasi Irlandia di bidang ini jarang dalam konteks kepolisian, penelitian yang muncul dari bidang pidana tetap menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual terlalu terwakili dalam sistem peradilan pidana Irlandia. Studi terkemuka di bidang ini, misalnya, menemukan potensi prevalensi 28% dari "kecacatan intelektual yang signifikan" di penjara Irlandia (Murphy et al., 2000).

Tingkat prevalensi gangguan intelektual yang tinggi di dalam penjara Irlandia menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan kapasitas lembaga peradilan pidana Irlandia, termasuk khususnya, melayani anggota An Garda S untuk, sekaligus, mengenali dan menanggapi situasi dengan tepat. melibatkan tersangka dengan disabilitas intelektual. Meskipun penelitian jarang dilakukan di bidang ini, kegagalan profesi hukum Irlandia, misalnya, untuk memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh peradilan pidana adversarial bagi penyandang disabilitas telah dicatat dalam wacana iktologis Irlandia. Sementara itu, pada tahap pra-sidang proses pidana, kebutuhan yang jelas untuk "mengarusutamakan" pelatihan kesadaran disabilitas dalam dinas kepolisian Irlandia telah direkomendasikan sejak tahun 1996 dan, sekali lagi, pada tahun 2018.

Namun, sementara seperti yang akan dibahas di bawah – beberapa langkah positif yang sangat signifikan baru-baru ini telah diambil untuk mempromosikan kesadaran disabilitas yang lebih besar di dalam An Garda S, area ini telah ditargetkan untuk aktivisme operasional lebih lanjut selama bertahun-tahun. depan.

Penyebab kekhawatiran: kasus Dean Lyons dan Peraturan Kustodi 1987

Dari perspektif sejarah, bahaya nyata yang terkait dengan kegagalan untuk mengadaptasi prosedur polisi Irlandia dengan mempertimbangkan kebutuhan tersangka penyandang disabilitas intelektual disorot dalam kasus Dean Lyon. Kasus ini muncul setelah pembunuhan ganda pada Maret 1997. Kedua korban ditikam dan dimutilasi di rumah mereka di halaman rumah sakit jiwa. Menyusul penyelidikan atas kematian ini, Tuan Lyons secara sukarela hadir di kantor polisi dan, setelah empat wawancara (mencakup 6 jam 35 menit), dia mengakui pembunuhan tersebut. Pada saat pengakuannya, Tuan Lyons berusia 24 tahun. Dia adalah seorang pecandu heroin tanpa tempat tinggal tetap. Dia juga memiliki riwayat menghadiri sekolah khusus dan digambarkan sebagai "ketidakmampuan belajar batas" (Birmingham, 2006, p. 149). Beberapa minggu setelah pengakuan Dean Lyons, Mark Nash, yang diduga terlibat dalam pembunuhan ganda lainnya di Co. Roscommon, mengakui pembunuhan Grangeegorman.

Sebuah Komisi Investigasi atas Kasus Dean Lyons kemudian dibentuk untuk mempertimbangkan perkembangan forensik, yang berkontribusi terhadap pengakuan kesalahannya yang salah (Birmingham, 2006). Sementara Komisi pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada upaya yang disengaja untuk merongrong hak-hak Dean Lyons, disebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pengarah yang tidak pantas secara tidak sengaja diajukan kepadanya oleh anggota An Garda S, yang membekalinya dengan informasi untuk dipertahankan. pengakuan yang kredibel (walaupun salah). Juga dicatat bahwa Dean Lyons tidak normal dan sangat mudah dibujuk, dan bahwa dia memiliki kecenderungan abnormal untuk menyerah pada pertanyaan yang mengarahkan. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki rekam jejak panjang dalam mengarang cerita yang sepenuhnya salah dan mampu menceritakan kisah ini dengan cara yang meyakinkan.

Sebagai buntut dari publikasi temuan-temuan Komisi, dan sehubungan dengan publikasi keprihatinan serupa oleh Pengadilan Morris sehubungan dengan praktik investigasi polisi, model wawancara yang sama sekali baru – Model Wawancara Garda S diurus utamakan dalam operasi kepolisian Irlandia. Seperti yang dijelaskan oleh Conway dan Daly (2019), model baru ini melibatkan “pergeseran total dalam cara wawancara dilakukan”:

“Wawancara, di bawah model berubah dari ruang pencarian pengakuan menjadi ruang pengumpulan informasi. Mereka dilakukan secara terstruktur, melalui ‘Fase Generik’: perencanaan dan persiapan; pertemuan pertama; membangun hubungan; akun pengetahuan; menilai, menguatkan dan menantang; dan penutupan. Wawancara harus dilakukan dengan cara yang sama baik sebagai tersangka, korban atau saksi dengan penekanan pada pertimbangan khusus dari individu yang diwawancarai, termasuk tingkat kerja sama, kapasitas intelektual dan psikologis mereka. Ada kerangka kompetensi untuk pewawancara, dengan Garda dilatih ke berbagai tingkatan tergantung pada keterlibatan mereka dalam wawancara.”

Pengarusutamaan model wawancara reflektif ini di seluruh An Garda S mewakili langkah penting untuk memenuhi kebutuhan tersangka yang rentan. Ini juga, yang penting, dibangun di atas serangkaian pengamanan prosedural yang diamanatkan oleh Peraturan Penahanan 1987, termasuk penyediaan dokumen Pemberitahuan Hak, dan pengenalan protokol Penilaian Risiko Penahanan (Cusack, 2021).

Meskipun langkah-langkah undang-undang ini telah lama dianggap mewakili benteng prosedural sentral melawan praktik polisi yang tidak tepat di Irlandia, keefektifannya telah goyah di bawah pengawasan baru-baru ini. Misalnya dalam People (DPP), pernyataan yang memberatkan yang dibuat oleh seorang anak dengan “kecerdasan rendah” dianggap dapat diterima sebagai bukti dalam keadaan di mana hal itu diperoleh dengan bertentangan dengan Peraturan. Dalam keadaan tersebut, Pengadilan Banding memutuskan bahwa, dengan tidak adanya interogasi yang tidak adil atau menindas, hakim pengadilan di Irlandia memiliki kebijaksanaan dalam menentukan apakah akan mengakui atau tidak mengakui pernyataan yang melanggar Regulasi. Dengan latar belakang perlindungan hukum yang seolah-olah keropos yang diberikan oleh Peraturan Kustodi, penggalan perspektif pemangku kepentingan baru-baru ini sehubungan dengan hambatan kontemporer yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual ketika berinteraksi dengan An Garda S sangat tepat waktu.

3. Metode

Sebuah survei terhadap orang-orang dari organisasi perwakilan untuk penyandang disabilitas intelektual, orang yang bekerja dengan organisasi sukarela untuk penyandang disabilitas intelektual, profesional kesehatan yang bekerja dengan penyandang disabilitas intelektual dan profesional dari sistem peradilan pidana (termasuk anggota An Garda S, pengacara, hakim, petugas polisi bandara, serta praktisi medis forensik) dilakukan selama satu bulan kalender (1–31 Juli 2020) untuk menimbulkan hambatan yang dirasakan bagi penyandang disabilitas intelektual dalam interaksi mereka dengan polisi. Responden diidentifikasi melalui teknik purposive sampling (lihat Gulati et al., 2021a, untuk analisis terperinci), dan semua data yang dapat diidentifikasi dianonimkan pada saat pengumpulan. Tanggapan survei kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk demografi responden (peran, peran khusus, pengalaman bertahun-tahun) dan analisis tematik kualitatif diselesaikan menggunakan perangkat lunak NVIVO 11 untuk mengidentifikasi dan mengekstrak tema dari balasan ini. Dua peneliti mengkodekan data kualitatif secara independen dan mencapai konsensus tentang tema yang muncul.

4. Pembahasan

Sembilan puluh lima (n = 95) tanggapan diterima untuk survei, yang semuanya dianalisis melalui model buku kode analisis tematik yang dikenal sebagai ATA menghasilkan tiga tema berbeda: (1) “Hambatan Komunikasi”; (2) “Membangun Kesadaran dan Keterampilan”; dan (3) “Perubahan Kelembagaan dan Sistem” (Gulati et al., 2021a). Tema “Barriers to Communication” mengungkapkan defisit informasi di antara tersangka penyandang disabilitas intelektual sehubungan dengan formalitas operasional sistem peradilan pidana Irlandia. Secara khusus, analisis tersebut menghasilkan potret lanskap pra-sidang yang dapat gagal untuk mengenali dan beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi unik dari tersangka penyandang disabilitas intelektual (lihat Gulati et al., 2021a, untuk analisis terperinci). Menurut penelitian, tersangka yang diambil dari konstitusi ini dapat menghadapi tantangan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Irlandia dalam memahami, tidak hanya keseriusan dugaan kejahatan mereka dan dampaknya terhadap orang lain, tetapi juga bagaimana tanggapan

mereka sendiri dapat menyebabkan kesulitan lebih lanjut. mereka.

Mereka juga dapat menghadapi kesulitan untuk menunjukkan bahwa mereka membutuhkan dukungan tambahan, yang pada gilirannya dapat menghalangi mereka untuk memahami informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang penting (termasuk kewaspadaan polisi). Ada juga risiko bahwa perilaku individu-individu ini akan disalahartikan, dan tanggapan mereka di bawah interogasi akan menjadi bias dengan mempertanyakan taktik yang mengabaikan dimensi ontologis gangguan intelektual, termasuk, khususnya, kerentanan yang meningkat dari beberapa individu terhadap persetujuan dan saran. Penyelidikan juga menyoroti tantangan yang dialami oleh petugas penegak hukum dalam mengenali keberadaan disabilitas dan pentingnya hal ini sebagai langkah awal yang penting untuk menawarkan dukungan yang diperlukan.

Tema “Membangun Kesadaran dan Keterampilan” menemukan perlunya dukungan bagi penyandang disabilitas intelektual dan keluarganya untuk lebih memahami sistem dan mengembangkan strategi untuk mengelola interaksi mereka dengan aparat penegak hukum. Ini menguraikan perlunya program pelatihan bagi petugas penegak hukum yang mencakup keterampilan dalam mengenali orang-orang yang mungkin memiliki disabilitas, strategi komunikasi khusus dan penekanan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang diinformasikan oleh pengalaman hidup para penyandang disabilitas intelektual. Tema ketiga, “Perubahan Kelembagaan dan Sistem” menggarisbawahi perlunya kolaborasi berkelanjutan antara aparat penegak hukum dan lembaga yang mendukung penyandang disabilitas intelektual dan mendorong tanggung jawab organisasi dalam sistem peradilan pidana dalam memelihara etos penghormatan dan kesadaran akan tantangan yang kompleks bagi penyandang disabilitas intelektual. Selanjutnya, ini menyoroti perlunya sumber daya pelatihan petugas penegak hukum serta penyediaan dukungan spesialis untuk membantu petugas penegak hukum dalam pekerjaan mereka (Gulati et al., 2021c). Kebutuhan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mendapatkan dukungan yang berarti dan informasi yang dapat diakses dalam format tertulis atau lainnya dianggap penting.

Diskusi

Kerentanan psikologis

Wawasan yang digali dari penyelidikan empiris (Gulati et al., 2021a) memberikan dukungan untuk proposisi bahwa penyandang disabilitas intelektual menghadapi tantangan kognitif dan komunikatif yang unik ketika menegosiasikan formalitas forensik praperadilan dari sistem hukum permusuhan (Cusack, 2018). Secara khusus, laporan yang diperoleh dari responden tidak hanya mengungkapkan bahwa orang dengan kondisi ini lebih rentan terhadap sugesti, tetapi juga menegaskan bahwa kerentanan psikologis ini dapat diperburuk oleh berbagai faktor lingkungan. Penelitian telah menunjukkan bahwa respons individu terhadap pertanyaan forensik akan dibiarkan oleh status aktor wawancara dan formalitas tempat di mana pertukaran berlangsung (Kebbell et al., 2004). Dukungan diam-diam untuk temuan ini terungkap dengan kedok pengakuan dampak yang dapat dirusak yang dapat ditimbulkan oleh kecemasan terhadap kinerja perilaku individu yang ditanyai.

Mengingat hambatan kognitif dan lingkungan ini untuk mendapatkan bukti terbaik, mungkin tidak mengherankan bahwa penyelidikan empiris menemukan kekhawatiran sehubungan dengan aksesibilitas komunikasi dari pejabat polisi Irlandia dengan anggota konstitusi ini. Meskipun temuan ini konsisten dengan literatur internasional (Henshaw dan Thomas, 2012), hal ini menimbulkan pertanyaan tentang akurasi naratif dari kesaksian yang diperoleh dari penyandang disabilitas intelektual pada tahap pra-sidang dalam proses pidana Irlandia, dan ini menarik perhatian yang jelas pada pentingnya mengarusutamakan perlindungan prosedural untuk mengurangi risiko memunculkan pernyataan yang bias dan tidak akurat.

Mengenali dan Menanggapi Disabilitas Intelektual

Terbukti dari umpan balik yang dikemas dalam tema “Membangun Kesadaran dan Keterampilan”, penyelidikan empiris tersebut menghasilkan potret aparat peradilan pidana praperadilan yang terus menemui kesulitan baik dalam mengenali maupun menanggapi realitas ontologis disabilitas intelektual. Anggota An Garda S, perlu dicatat, tidak sendirian dalam hal ini, dan penelitian internasional menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di seluruh dunia common law secara rutin berjuang untuk secara akurat mengidentifikasi orang-orang yang rentan (Burton et al., 2006).

Tidak adanya kesadaran budaya umum di antara petugas penegak hukum tentang sifat kognitif dan karakteristik perilaku disabilitas intelektual telah dikaitkan dengan polisi yang mampu dan rezim pelatihan hukum, yang

didasarkan hampir seluruhnya pada laporan arus utama saksi. Akibatnya, aparat penegak hukum diketahui menggunakan berbagai metode informal untuk membantu mengidentifikasi seseorang dengan disabilitas intelektual, termasuk karakteristik dan pemahaman wajah, serta perilaku dalam tahanan (Douglas dan Cuskelly, 2012).

Namun, mengenali gangguan intelektual hanyalah salah satu bagian dari solusi. Tanpa adopsi konsekuensi oleh polisi dari pendekatan sensitif ontologis terhadap kondisi mereka, keuntungan bermakna yang terkait dengan identifikasi yang benar ini dapat hilang seluruhnya (Cusack, 2018). Namun, tanggapan yang diperoleh dari penyelidikan empiris menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran di kalangan polisi Irlandia sehubungan dengan menanggapi secara tepat individu dengan disabilitas intelektual. Dengan tidak adanya kesadaran seperti itu, tetap ada tidak hanya risiko bahwa anggota An Garda S akan gagal mengejar teknik forensik yang dirancang untuk mendapatkan bukti terbaik dalam penyelidikan investigasi mereka, tetapi lebih merupakan risiko yang lebih luas bahwa mereka akan menolak klaim. melibatkan individu dengan disabilitas intelektual dengan alasan bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang masih ada di tingkat nasional dan tingkat internasional (Keilty dan Connelly, 2001).

Informasi yang Dapat Diakses

Penyelidikan empiris menyoroti perlunya penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses. Sekali lagi, temuan ini menunjukkan bahwa petugas penegak hukum Irlandia menghadapi kesulitan yang sama dalam memenuhi kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas intelektual seperti rekan internasional mereka (Parsons dan Sherwood, 2016). Temuan ini sangat penting bila dilihat mengingat kewajiban yang ada pada An Garda S untuk mengadopsi praktik komunikasi inklusi di bawah kedua negara dan hukum internasional (Pasal 9, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)).

Menuju kepolisian inklusi: inovasi dalam An Garda Siochana

Penting untuk menunjukkan bahwa survei empiris baru-baru ini dilakukan dengan latar belakang aktivisme yang berfokus pada hak asasi manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam infrastruktur prosedural dan etos budaya An Garda S. Transisi menuju model pemolisian berbasis hak asasi manusia ini dapat ditelusuri hingga publikasi laporan bersejarah berjudul *The Future of Policing in Ireland* pada bulan September 2018 yang menetapkan visi untuk “pelayanan polisi yang direformasi dan dihidupkan kembali” (Cusack, 2019). Secara signifikan, komponen utama dari visi ini adalah perancangan infrastruktur hak asasi manusia baru dalam pola pikir, etos, dan operasi semua anggota An Garda S.

Pada tingkat kebijakan, visi ini tercermin dalam Strategi Hak Asasi Manusia An Garda S 2020–2022. Sementara itu, pada tingkat prosedural, penekanan budaya pada nilai-nilai penegakan hukum berbasis hak telah mendorong pengenalan atas dasar percontohan serangkaian inovasi pra-persidangan yang penting dan berkelanjutan, yang telah dirancang khusus untuk menunjukkan peningkatan kepekaan terhadap kebutuhan dan keprihatinan penyandang disabilitas intelektual, termasuk: (1) tinjauan praktik penilaian risiko penahanan; (2) peninjauan Pemberitahuan Hak; dan (3) peluncuran skema Pelatihan Kesadaran Disabilitas percontohan.

Tinjauan pemberitahuan hak

Seperti yang ditunjukkan artikel ini, banyak hambatan internasional yang dialami penyandang disabilitas intelektual dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum termasuk akses ke informasi dalam format yang dapat diakses juga terlihat di Irlandia (Gulati et al., 2021a). Salah satu situs utama yang menjadi perhatian dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang tepat waktu kepada tersangka tentang hak-haknya (Cusack, 2021).

Seperti yang Parsons dan Sherwood (2016, p. 556) jelaskan: “jika seseorang merasa sulit untuk memahami informasi penting mengenai hak, keberhakan dan proses mereka dalam [sistem peradilan pidana]... ada risiko kerugian yang signifikan dan potensi untuk kegagalan keadilan”. Memang, risiko ini diakui oleh pengadilan Strasbourg di *Z.H. v Hungaria* (Permohonan No. 28973/11, putusan 8 November 2012) di mana otoritas kepolisian Hungaria diputuskan telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia karena gagal mengambil tindakan khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi tahanan yang “secara bawaan tuli dan bisu serta memiliki kecacatan intelektual tingkat menengah”.

Namun, hingga saat ini, prosedur polisi Irlandia gagal untuk mengakui pentingnya memberikan Formulir

Pemberitahuan Hak menurut undang-undang dalam format yang mudah dibaca kepada tersangka dengan disabilitas intelektual. Memang, justru sebaliknya, yurisprudensi Irlandia beroperasi selama bertahun-tahun untuk secara aktif membebaskan anggota An Garda S dari kewajiban apa pun untuk mengambil langkah proaktif guna memastikan bahwa tersangka yang rentan memahami hak dan hak mereka. Dalam DPP memutuskan bahwa persyaratan untuk memberikan Pemberitahuan Hak berdasarkan Peraturan Kustodi (dibahas di atas) dipenuhi dengan hanya mengeluarkan dokumen kepada terdakwa tanpa membuat setiap penyelidikan yang berarti ke dalam kapasitasnya untuk memahaminya.

Bukti terbaru, bagaimanapun, menunjukkan kesediaan operasional yang berkembang dalam An Garda S untuk mengambil langkah proaktif untuk mengatasi praktik pra-persidangan yang tertanam dan mampu ini dan, pada saat penulisan, tinjauan multi-disiplin utama dari Pemberitahuan Formulir Hak sedang dalam proses penyelesaian (Cusack, 2021). Dengan menggunakan metodologi kelompok fokus melibatkan pakar nasional dan internasional di bidang psikiatri, psikologi, hukum dan terapi wicara dan bahasa, serta perwakilan dari badan disabilitas nasional, anggota aktif An Garda S, dan yang paling penting, orang-orang dengan pengalaman hidup disabilitas intelektual tinjauan ini menjanjikan untuk menghasilkan Pemberitahuan Hak yang Mudah Dibaca pertama di dunia yang “berdasarkan pengalaman hidup”. Mengingat bahwa, kurang dari 5% penandatanganan UNCRPD saat ini melaporkan kemajuan dalam mengembangkan materi informasi yang dapat diakses oleh orang-orang dengan ketidakmampuan belajar (Gulati et al., 2021b), pendekatan yang dipimpin oleh pengguna yang inovatif ini dapat memberikan template praktik terbaik untuk memungkinkan internasional lainnya pasukan polisi untuk menyesuaikan praktik penahanan mereka agar selaras dengan kewajiban internasional mereka.

Tinjauan Praktik Penilaian Risiko

Menanggapi publikasi Pemerintah Irlandia tentang Layanan Pemolisian untuk Masa Depan Kita (2018), An Garda S meluncurkan tinjauan nasional praktik penilaian risiko pada April 2020 untuk tujuan melakukan “penilaian paling rentan dalam sistem peradilan pidana” (Pemerintah Irlandia, 2018, hlm. 16). Secara signifikan, tinjauan ini – yang sedang berlangsung pada saat penulisan – merupakan penilaian ulang besar kedua dari praktik penilaian risiko Irlandia di Irlandia dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun temuan yang tepat dari tinjauan yang sedang berlangsung masih harus dilihat, bukti awal menunjukkan bahwa praktik penilaian risiko polisi Irlandia akan disesuaikan kembali untuk tujuan tersebut, tidak hanya untuk mengelola risiko (melalui fokus pada masalah kesehatan mental), tetapi juga untuk memfasilitasi identifikasi yang tepat dari tersangka penyandang disabilitas intelektual pada titik kontak pertama dengan sistem peradilan pidana Irlandia. Dalam mengusulkan untuk memperpanjang protokol penilaian risiko Irlandia yang ada sehingga dapat mengakomodasi penilaian kerentanan (dengan memasukkan bagian baru yang berkaitan secara khusus dengan kecacatan intelektual), temuan tinjauan menjanjikan untuk menghindari kekurangan diagnostik yang secara historis terkait dengan penggunaan eksklusif matriks risiko untuk mengidentifikasi intelektual disabilitas (Stoneman et al., 2019). Memang, kebutuhan mendesak yang tidak terpenuhi untuk mengarusutamakan penilaian kerentanan semacam itu dalam prosedur kepolisian Irlandia terbukti dari penyelidikan empiris baru-baru ini yang menggali kekhawatiran di antara pemangku kepentingan peradilan pidana terkait dengan kapasitas pejabat kepolisian Irlandia untuk mengidentifikasi disabilitas intelektual (Gulati et al., 2021a).

Selain itu, dengan mengamankan pertimbangan kondisi intelektual tersangka pada saat penangkapan, pendekatan baru yang diusulkan akan memastikan bahwa anggota An Garda S mempertimbangkan kelayakan tersangka untuk mendapat dukungan di bawah Peraturan Penahanan pada titik menangkap. Dengan merancang, dalam hal ini, model yang lebih konsisten dan komprehensif untuk mengidentifikasi dan mendukung tersangka penyandang disabilitas intelektual pada tahap awal proses pra-sidang Irlandia, tinjauan berkelanjutan menjanjikan peningkatan praktik kepolisian sesuai dengan urgensi konstitusi Irlandia, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan UNCRPD.

Pelatihan Kesadaran Disabilitas

Pada bulan April dan Juni 2021, An Garda S meluncurkan studi percontohan pelatihan kesadaran disabilitas untuk petugas polisi (Gulati et al., 2021c). Secara signifikan, desain dan isi dari skema pelatihan ini diinformasikan oleh temuan dari penyelidikan empiris baru-baru ini tentang hambatan yang dirasakan yang

dihadapi penyandang disabilitas intelektual dalam mencari akses keadilan di Irlandia (Gulati et al., 2021a). Berdasarkan temuan terakhir, model pelatihan empat poin dirancang, yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan untuk “(1) Mengenali kapantersangka mungkin memiliki disabilitas intelektual, (2) Memberikan informasi kepada tersangka yang rentan, (3) Meningkatkan keterampilan komunikasi termasuk situasi krisis, dan (4) Mendukung penyandang disabilitas intelektual dalam tahanan” (Gulati et al., 2021c). Pelatihan ini disampaikan oleh tim ahli medis dan hukum yang menggunakan format seminar online interaktif (durasi 90 menit) dengan sketsa dan video wawancara penyandang disabilitas intelektual sehubungan dengan interaksi penegakan hukum.

Keberhasilan model pelatihan quadripartite ini baru-baru ini terungkap dalam evaluasi empiris dari program percontohan, yang mencatat bahwa “peningkatan yang signifikan secara statistik ditemukan dalam pengetahuan diri peserta tentang disabilitas intelektual, pemahaman mereka tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual. dalam interaksi penegakan hukum, keterampilan komunikasi mereka dan pengetahuan mereka tentang cara mendekati penyandang disabilitas dalam krisis” (Gulati et al., 2021c, hlm. 1). Temuan ini, disampaikan, sangat tepat mengingat temuan tematik dari penyelidikan empiris baru-baru ini dan memberikan cetak biru yang kuat secara empiris untuk mengatasi tantangan yang dirasakan oleh tersangka dengan disabilitas intelektual saat ini dalam sistem peradilan pidana Irlandia (Gulati et al., 2021a).

5. Kesimpulan

Dalam meniru literatur internasional yang masih ada sehubungan dengan kesulitan yang terkait dengan mengadaptasi prosedur polisi arus utama untuk mengakomodasi kebutuhan tersangka penyandang disabilitas intelektual, makalah ini mengungkapkan serangkaian tantangan yang melekat untuk mengakses keadilan bagi anggota konstitusi ini di Irlandia. Pada saat penulisan, hambatan komunikasi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan serta kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk perubahan institusional dan sistemis, telah diidentifikasi sebagai tantangan utama bagi tersangka penyandang disabilitas intelektual dalam interaksi mereka dengan An Garda S (Gulati et al., 2021a). Namun, serangkaian latihan reformasi inklusi yang dipimpin oleh penelitian termasuk peninjauan praktik penilaian risiko penahanan yang sedang berlangsung; peninjauan Pemberitahuan Hak; dan peluncuran skema Pelatihan Kesadaran Disabilitas menawarkan alasan untuk berharap bahwa perubahan paradigmatik menuju model pemolisian inklusi sudah dekat dalam An Garda S.

Pada saat penulisan, inisiatif ini masih dalam tahap implementasi awal, dan baik lintasan maupun garis waktu peluncurannya pada skala nasional masih harus dilihat. Namun, berdasarkan temuan makalah ini, kebutuhan mendesak untuk kemajuan mereka jelas. Secara khusus, kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk mengarusutamakan pelatihan kesadaran disabilitas yang disesuaikan – yang dirancang dan disampaikan bekerja sama dengan layanan disabilitas dan orang-orang dengan pengalaman hidup disabilitas intelektual telah muncul sebagai tema utama yang mendasari penelitian ini. Selain itu, rencana pengungkapan Formulir Pemberitahuan Hak yang lebih mudah diakses untuk digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan tersangka yang rentan, selain pengenalan kerangka kerja Catatan Penilaian Risiko yang lebih canggih, disambut baik karena menjanjikan untuk melengkapi pelatihan ini dengan melengkapi polisi Irlandia. petugas dengan alat penyaringan penting yang akan membantu mereka dalam memahami dan mengidentifikasi gangguan intelektual. Negara-negara penandatanganan UNCPRD lainnya, disampaikan, mungkin akan berguna untuk mempertimbangkan percontohan skema inklusi serupa di masa depan dengan pandangan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka untuk menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain sesuai dengan Pasal 13 Konvensi.

Daftar Pustaka

- Beail, N. (2002). Interrogative suggestibility, memory and intellectual disability. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 15(2), 129-137.
- Birmingham, G. (2006). *Report of the Commission of Investigation (Dean Lyons Case): Set Up Pursuant to the Commissions of Investigation Act 2004*. Stationery Office.

- Burton, M., Evans, R., & Sanders, A. (2006). *Are Special Measures for Vulnerable and Intimidated Witnesses Working?: Evidence from the Criminal Justice Agencies*. London: Home Office.
- Conway, V., & Daly, Y. M. (2019). From legal advice to legal assistance: recognising the changing role of the solicitor in the Garda station. *Irish Judicial Studies Journal*, 2019(1), 103-123.
- Cusack, A. (2017). Victims of crime with intellectual disabilities and Ireland's adversarial trial: Some ontological, procedural and attitudinal concerns. *N. Ir. Legal Q.*, 68, 433.
- Cusack, A., Cooper, P., & Hunting, L. (2018). *The pre-trial position of vulnerable victims of crime in Ireland. Access to Justice for Vulnerable People* London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing.
- Cusack, A. (2019), "Policing vulnerable communities: a reflection on the future of policing in Ireland", *Garda Review*, Vol. 47 No. 4.
- Cusack, A. (2020). Addressing vulnerability in Ireland's criminal justice system: A survey of recent statutory developments. *The International Journal of Evidence & Proof*, 24(3), 280-306.
- Cusack, A. (2020). Beyond special measures: Challenging traditional constructions of competence and cross-examination for vulnerable witnesses in Ireland. *Irish Judicial Studies Journal*, 3(1), 98-115.
- Cusack, A. (2021). Reforming Ireland's adversarial trial for victims of crime with intellectual disabilities. *Giving Voice to Diversity in Criminological Research: 'Nothing about Us without Us'*, 233.
- Cusack, A. (2021), "An overview of the legal position of vulnerable suspects and defendants in Ireland", Irish Criminal Justice Agencies Annual Conference, Dublin, 4 June 2021.
- Cusack, A. (2022), "From special measures to separate legal representation: charting shifts in the treatment of victims of crime with intellectual disabilities in Ireland", *Dublin University Law Journal*, forthcoming.
- Diesfeld, K., McLean, M., Phelan, T., Patston, P., Miller-Burgering, W., & Vickery, R. (2008). The challenge of designing optimum legal services for disabled people: the New Zealand experience. *Disability & Society*, 23(5), 431-443.
- Douglas, L., & Cuskelly, M. (2012). A focus group study of police officers' recognition of individuals with intellectual disability. *Psychiatry, Psychology and Law*, 19(1), 35-44.
- Gudjonsson, G. H. (2003). *The psychology of interrogations and confessions: A handbook*. John Wiley & Sons.
- Gudjonsson, G. H. (2010). Psychological vulnerabilities during police interviews. Why are they important?. *Legal and criminological Psychology*, 15(2), 161-175.
- Gudjonsson, G. H., Murphy, G. H., & Clare, I. C. (2000). Assessing the capacity of people with intellectual disabilities to be witnesses in court. *Psychological medicine*, 30(2), 307-314.
- Gulati, G., Cusack, A., Kelly, B. D., Kilcommins, S., & Dunne, C. P. (2020). Experiences of people with intellectual disabilities encountering law enforcement officials as the suspects of crime—A narrative systematic review. *International journal of law and psychiatry*, 71, 101609.
- Gulati, G., Cusack, A., Bogue, J., O'Connor, A., Murphy, V., Whelan, D., Cullen, W., McGovern, C., Kelly, B.D., Fistein, E., Kilcommins, S. and Dunne, C.P. (2021a), "Challenges for people with intellectual disabilities in law enforcement interactions in Ireland; thematic analysis informed by 1537 person-years' experience", *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 75, 101683.
- Gulati, G., Kelly, B. D., Cullen, W., Kukaswadia, S., Cusack, A., Kilcommins, S., & Dunne, C. P. (2021). What is the role of doctors in respect of suspects with mental health and intellectual disabilities in police custody?. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 1-6.
- Gulati, G., Cusack, A., Murphy, V., Kelly, B. D., Kilcommins, S., & Dunne, C. P. (2021). The evaluation of a training course to enhance intellectual disability awareness amongst law enforcement officers: a pilot study. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 1-5.

- Gulati, G., Kelly, B.D., Cusack, A., Kilcommins, S. and Dunne, C.P. (2020c), "The experience of law enforcement officers interfacing with suspects who have an intellectual disability – a systematic review", *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 72, 101614.
- Henshaw, M., & Thomas, S. (2012). Police encounters with people with intellectual disability: prevalence, characteristics and challenges. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56(6), 620-631.
- Kebbell, M. R., Hatton, C., & Johnson, S. D. (2004). Witnesses with intellectual disabilities in court: What questions are asked and what influence do they have?. *Legal and Criminological Psychology*, 9(1), 23-35.
- Kebbell, M. R., Hatton, C., Johnson, S. D., & O'Kelly, C. M. (2001). People with learning disabilities as witnesses in court: What questions should lawyers ask?. *British Journal of Learning Disabilities*, 29(3), 98-102.
- Keilty, J., & Connelly, G. (2001). Making a statement: An exploratory study of barriers facing women with an intellectual disability when making a statement about sexual assault to police. *Disability & Society*, 16(2), 273- 291.
- Murphy, G. (2019). People with intellectual and/or developmental disabilities in the criminal justice system. *Journal of Intellectual Disability Research*, 63(7), 631.
- Murphy, M., Harrold, M., Carey, S., & Mulrooney, M. (2000). A survey of the level of learning disability among the prison population in Ireland. *Dublin: Department of Justice, Equality and Law Reform*.
- Parsons, S., & Sherwood, G. (2016). Vulnerability in custody: perceptions and practices of police officers and criminal justice professionals in meeting the communication needs of offenders with learning disabilities and learning difficulties. *Disability & Society*, 31(4), 553-572.
- Stoneman, M. J., Jackson, L., Dunnett, S., & Cooke, L. (2018). Variation in detainee risk assessment within police custody across England and Wales. *Policing and society*.
- Thompson, J., & Payne, B. (2019). Towards professionalism and police legitimacy? An examination of the education and training reforms of the police in the Republic of Ireland. *Education Sciences*, 9(3), 241.